

BAB I

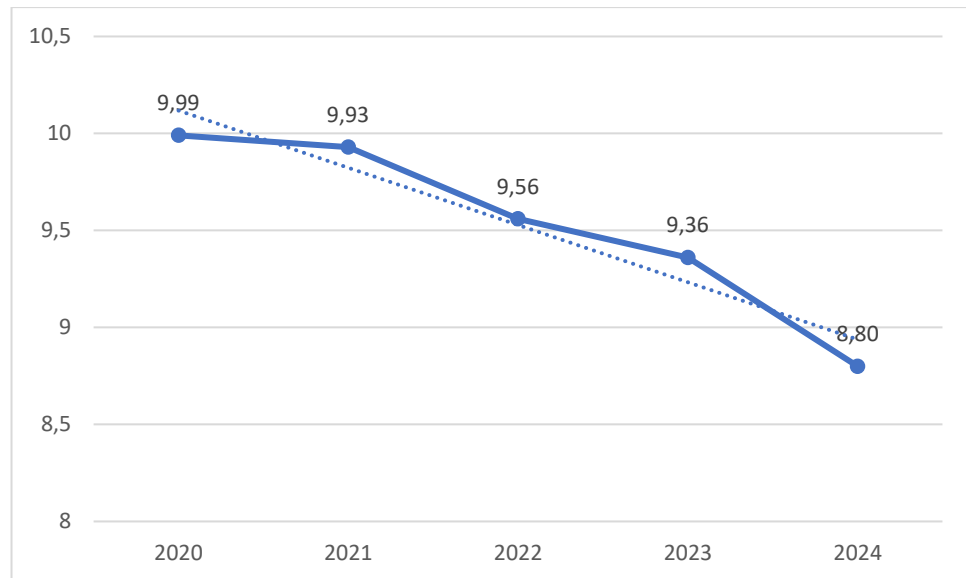
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kemiskinan masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi di Indonesia karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, stabilitas sosial, serta pemerataan kesejahteraan (Ilahi et al., 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (2024), penduduk miskin adalah mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, yang dihitung dari kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi tujuan fundamental dalam proses pembangunan ekonomi nasional dan tetap menjadi perhatian utama pemerintah serta berbagai lembaga pembangunan (Christiani & Nainupu, 2021).

Dalam perspektif teori kemiskinan struktural, tingkat kemiskinan dipandang sebagai akibat dari ketimpangan struktur sosial dan ekonomi. Sehingga tidak semata-mata mencerminkan karakteristik individu, tetapi lebih berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, infrastruktur pembangunan, dan kesempatan kerja yang layak (Todaro & Smith, 2020). Menurut Muta'ali (2025) menjelaskan bahwa ketimpangan akses tersebut menyebabkan kemiskinan cenderung bersifat persisten. Seseorang dikategorikan miskin apabila belum mampu memenuhi kebutuhan dasar atau belum memiliki penghasilan yang memadai untuk mempertahankan

kelangsungan hidupnya (Karolinska et al., 2023). Berikut di bawah ini merupakan data Tingkat kemiskinan di Indonesia dari tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan di Indonesia
Tahun 2010-2024
(Dalam Satuan Persen)

Grafik tingkat kemiskinan di Indonesia selama tahun 2020–2024 menunjukkan adanya kecenderungan penurunan dari waktu ke waktu, meskipun disertai dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Perubahan tersebut mencerminkan bahwa dinamika tingkat kemiskinan tidak bersifat linear dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang terus berkembang. Meskipun mengalami penurunan secara bertahap, tingkat kemiskinan di Indonesia sepanjang tahun pengamatan masih berada pada level yang relatif tinggi, sehingga menunjukkan bahwa permasalahan tingkat kemiskinan masih menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi. Untuk memahami

dinamika tersebut secara lebih rinci, perkembangan tingkat kemiskinan di Indonesia selanjutnya diuraikan berdasarkan tahun tertentu.

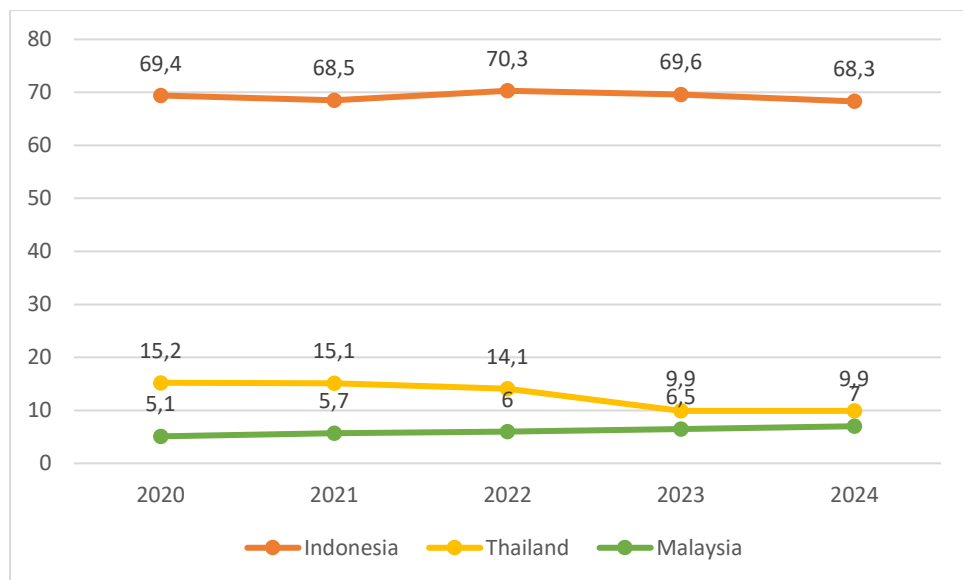
Peningkatan tingkat kemiskinan pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi dan penurunan pendapatan masyarakat, terutama kelompok tenaga kerja mikro yang sangat bergantung pada aktivitas mikro dan kecil. Pembatasan mobilitas dan perlambatan ekonomi tidak hanya memukul usaha mikro, tetapi juga mengganggu rantai pasok industri pengolahan non-migas, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kerentanan ekonomi rumah tangga (Ginting, 2021).

Penurunan kembali tingkat kemiskinan pada tahun 2023-2024 terjadi seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi domestik pasca pandemi dan penguatan program bantuan sosial pemerintah yang menjaga daya beli kelompok miskin, khususnya melalui skema perlindungan sosial seperti PKH dan bantuan pangan (Kemenkeu, 2024). Di sisi lain, sektor industri pengolahan non-migas mulai mengalami pemulihan, yang didukung oleh perluasan akses infrastruktur listrik di pedesaan yang membuka kembali peluang kerja dan pendapatan bagi masyarakat berpendapatan rendah (Antara, 2025).

Meskipun tingkat kemiskinan pada tahun 2023-2024 turun dari 9,36% menjadi 8,80%, capaian tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan target RPJMN 2020–2024 sebesar 6,5-7,5%. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Indonesia masih berada di atas target yang ditetapkan, sehingga

mengindikasikan bahwa laju penurunan tingkat kemiskinan belum optimal. (CNBC, 2023).

Keterbatasan capaian penurunan tingkat kemiskinan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan posisi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas (*Upper Middle Income Country/UMIC*). Menurut klasifikasi Bank Dunia, kelompok UMIC mencakup negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Negara-negara dalam kelompok ini umumnya diharapkan telah mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik serta mampu menekan tingkat kemiskinan ke level yang relatif lebih rendah dibandingkan negara berpendapatan menengah bawah. Berikut grafik di bawah ini perkembangan tingkat kemiskinan standar internasional.



Sumber: World Bank

Gambar 1.2
Tingkat Kemiskinan di Negara UMIC Tahun 2020-2024
(Dalam Satuan Persen)

Berdasarkan standar garis kemiskinan internasional Bank Dunia untuk negara berpendapatan menengah atas (*Upper Middle Income Countries* /UMIC), sekitar 68,3% penduduk Indonesia pada tahun 2024 masih berada di bawah ambang kesejahteraan kategori UMIC (World Bank, 2025). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan di negara-negara UMIC lainnya, seperti Malaysia sebesar 7,0% dan Thailand sebesar 9,9%. Perbedaan yang signifikan ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara dalam kelompok pendapatan yang sama.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kemiskinan nasional secara persentase mengalami penurunan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan penguatan kesejahteraan masyarakat secara struktural. Hal ini juga sejalan dengan belum tercapainya target RPJMN tahun 2024, yang menunjukkan bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan masih perlu ditingkatkan.

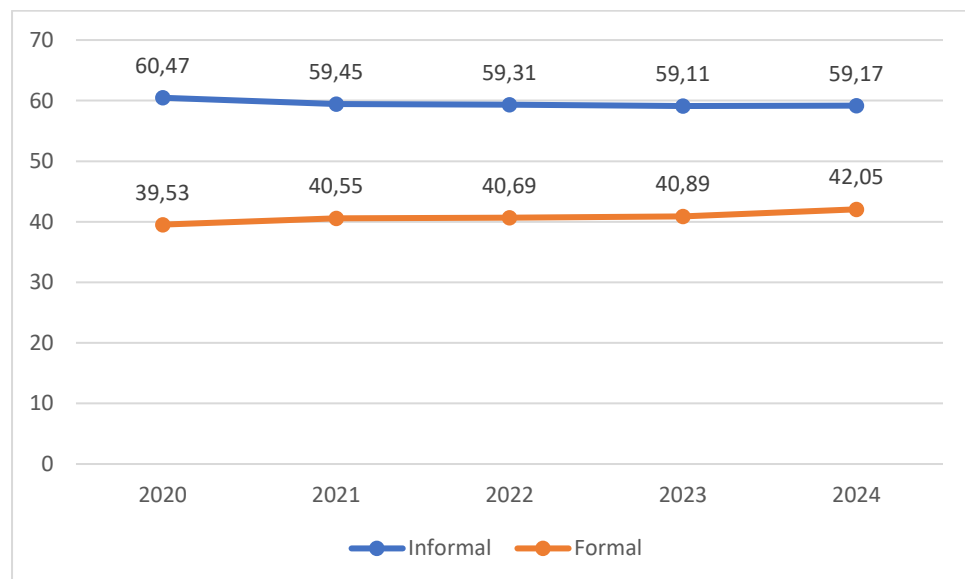
Secara struktural, tingginya tingkat kemiskinan tersebut diduga berkaitan dengan masih dominannya tenaga kerja di sektor informal (tenaga kerja mikro) yang memiliki produktivitas relatif rendah, keterbatasan akses infrastruktur listrik yang belum merata, serta belum optimalnya peran industri pengolahan non-migas dalam menciptakan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris untuk menguji pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan besaran angka secara agregat, tetapi juga mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian. Dalam konteks ini, pendekatan pengentasan kemiskinan yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan sosial, memiliki keterbatasan dalam mengatasi akar struktural kemiskinan, sehingga penurunan yang terjadi cenderung bersifat sementara dan rentan berbalik ketika terjadi guncangan ekonomi (Kemenko PMK, 2025).

Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih berorientasi pada penguatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui peningkatan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja. Optimalisasi akses infrastruktur listrik berpotensi mendorong peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan non-migas (Asrizal, 2020), yang selanjutnya dapat memperluas penyerapan tenaga kerja mikro ke arah kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan (Tempo, 2025). Tanpa penguatan pada aspek-aspek struktural tersebut, upaya Indonesia untuk mengejar standar kesejahteraan negara berpendapatan menengah atas berpotensi berjalan lambat dan menghadapi risiko stagnasi penurunan kemiskinan.

Dalam konteks permasalahan struktural tersebut, salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia adalah struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi oleh sektor informal, khususnya tenaga kerja mikro. Tenaga kerja mikro umumnya memiliki tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar

masyarakat berada pada posisi ekonomi yang rentan, sehingga berpotensi mempertahankan tingkat kemiskinan pada level Industri berperan dalam penyerapan tenaga kerja (Ulhaq et al., 2023). Oleh karena itu, dominasi tenaga kerja informal mengindikasikan keterbatasan penyerapan tenaga kerja pada sektor formal, yang pada akhirnya berimplikasi pada tingkat kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi terhadap tingginya tingkat kemiskinan (Munawir & Pamungkas, 2025). Dengan demikian, struktur tenaga kerja formal dan informal digunakan sebagai indikator dalam penelitian ini, karena sektor informal berperan penting dalam pembentukan dan penyerapan tenaga kerja mikro. Grafik di bawah ini menyajikan perbandingan tenaga kerja formal dan informal di Indonesia pada tahun 2020–2024.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3
Tenaga Kerja Formal dan Informal Tahun 2020-2024
(Dalam Satuan Persen)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa tenaga kerja informal lebih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Indonesia dibandingkan tenaga kerja formal. Persentase tenaga kerja informal berada pada kisaran di atas 60-50%, sementara tenaga kerja formal berkisar antara 40–45%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Indonesia masih menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor informal, yang di dalamnya termasuk tenaga kerja mikro sebagai salah satu penyerap tenaga kerja utama.

Dominasi tenaga kerja informal mencerminkan bahwa tenaga kerja mikro umumnya terserap pada sektor industri mikro dan kecil (IMK), yang berperan sebagai penopang utama aktivitas ekonomi masyarakat berpendapatan rendah (Mursalin et al., 2025). Meskipun memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja, sektor ini umumnya ditandai oleh keterbatasan modal, teknologi, serta tingkat produktivitas dan pendapatan yang relatif rendah, sehingga berdampak pada rendahnya kesejahteraan pekerja dan meningkatkan kerentanan terhadap kemiskinan (Munawir & Pamungkas, 2025). Oleh karena itu, peningkatan produktivitas dan keberlanjutan tenaga kerja mikro menjadi faktor penting dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia (Ilahi et al., 2023)

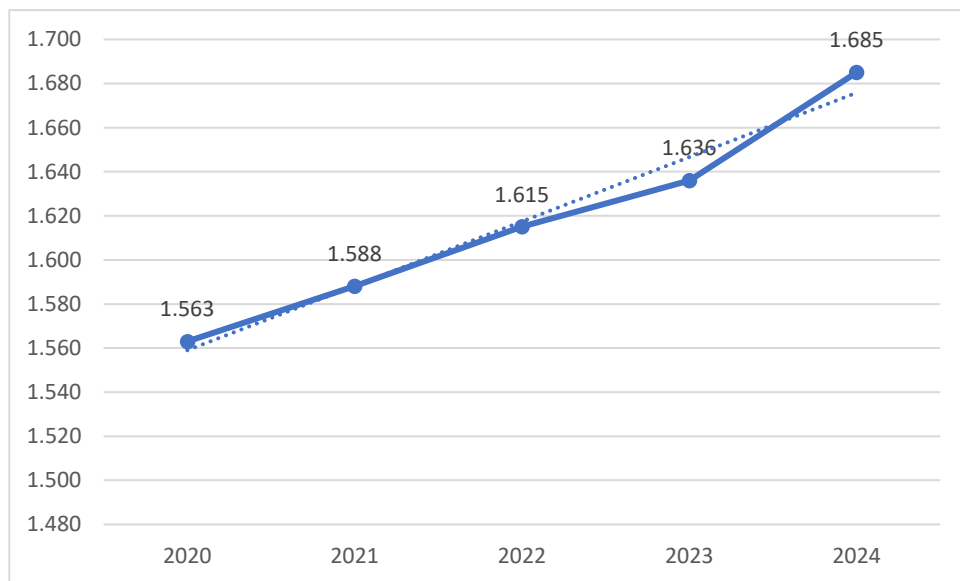
Namun demikian, keberlanjutan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mikro tidak hanya ditentukan oleh karakteristik sektor usahanya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, khususnya akses terhadap listrik yang memiliki peranan penting dalam mendukung pengentasan

kemiskinan (Aziz et al., 2025). Ketersediaan listrik tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sektor usaha kecil dan menengah yang menjadi penggerak utama perekonomian lokal (Detryesi et al., 2024). Pemanfaatan listrik secara produktif mampu mendorong pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan melalui penciptaan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan (Christiani & Nainupu, 2021). Banyak pembuat kebijakan meyakini bahwa perluasan akses terhadap listrik akan membantu masyarakat miskin meningkatkan kualitas hidupnya ke arah yang lebih baik (Christiani & Nainupu, 2021). Ketersediaan listrik dapat menjadi faktor penting dalam menunjang usaha mikro serta dapat menjadi prasyarat utama bagi berkembangnya sektor industri pengolahan sebagai penyedia lapangan kerja.

Selain melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja mikro dan perluasan akses infrastruktur listrik, pengentasan kemiskinan juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan sektor-sektor produktif berskala lebih besar yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis tersebut adalah industri pengolahan non-migas.

Industri pengolahan non-migas merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena kontribusinya yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah bahan baku domestik (Rachman et al., 2024). Pada tahun 2010–2024, sektor industri pengolahan non-migas secara rata-rata

memberikan kontribusi sekitar 18–19% terhadap PDB nasional, sehingga menjadi salah satu kontributor utama dalam struktur perekonomian Indonesia (Kompas, 2024). Selain kontribusinya terhadap output nasional, sektor ini juga memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja. Perkembangan industri pengolahan non-migas mendorong terciptanya kesempatan kerja yang lebih luas, baik secara langsung pada kegiatan produksi maupun secara tidak langsung melalui sektor-sektor pendukung. Peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4
Penyerapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Non-Migas di Indonesia
Tahun 2020-2024
(Dalam Satuan Persen)

Grafik tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan non-migas di Indonesia mengalami tren peningkatan selama tahun 2020–2024. Kondisi ini membuka peluang bagi masyarakat yang sebelumnya bekerja secara tidak tetap atau berada di sektor informal, khususnya tenaga kerja mikro, untuk beralih ke pekerjaan yang lebih produktif dengan tingkat pendapatan yang lebih teratur (Pantau, 2025). Peningkatan stabilitas pendapatan tersebut berpotensi memperbaiki daya beli rumah tangga dan menurunkan kerentanan terhadap kemiskinan (Kemenko PMK, 2025).

Besarnya kontribusi sektor industri pengolahan non-migas tidak hanya tercermin dari kemampuannya dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, tetapi juga dari perannya dalam menyerap tenaga kerja. Sebagai salah satu sektor strategis dalam proses industrialisasi, industri pengolahan non-migas mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat dan menjadi sarana perpindahan tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah ke sektor yang lebih produktif. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga dapat mendukung upaya pengurangan kemiskinan (Todaro & Smith, 2020).

Selain melalui penciptaan kesempatan kerja secara langsung, perkembangan industri pengolahan non-migas juga memberikan dampak tidak langsung terhadap tenaga kerja mikro. Pertumbuhan kawasan industri umumnya mendorong berkembangnya berbagai aktivitas ekonomi pendukung, seperti usaha mikro di bidang perdagangan, jasa transportasi, dan layanan pendukung lainnya (Budiyantri, 2025). Di samping itu, keterlibatan usaha mikro dalam

rantai pasok industri melalui pola kemitraan, subkontrak, atau maklon membuka peluang usaha yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro serta meningkatkan pendapatan masyarakat (Sari et al., 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan ekonomi yang kuat antara sektor industri pengolahan non-migas dan usaha mikro dalam menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi akses infrastruktur listrik, perkembangan industri pengolahan non-migas juga tidak dapat dilepaskan dari ketersediaan listrik yang memadai dan berkelanjutan. Akses listrik yang baik mendukung kelancaran proses produksi industri, mendorong investasi, serta memperluas kapasitas usaha sehingga meningkatkan kebutuhan tenaga kerja. Dengan demikian, akses infrastruktur listrik berperan sebagai faktor pendukung penting dalam mendorong pertumbuhan industri dan memperluas penyerapan tenaga kerja yang pada akhirnya dapat berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa industri pengolahan non-migas memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan, seperti penelitian oleh Pratama Projo et al. (2024), Misfaruddin et al. (2024), dan Janah dan Nuraini (2020) menemukan bahwa sektor industri, khususnya industri pengolahan non-migas, berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa industri manufaktur dan industri pengolahan non-migas berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, yang berarti peningkatan aktivitas industri mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena industri pengolahan non-migas memiliki

kemampuan dalam menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, perkembangan industri yang ditunjukkan melalui jumlah industri, tenaga kerja industri, dan kontribusi terhadap PDRB juga turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, industri pengolahan non-migas dapat menjadi salah satu faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan permasalahan yang diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *Model Vector Error Correction* (VECM) untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010–2024. Adapun penelitian ini menggunakan variabel tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas, yang hingga saat ini masih terbatas dikaji dalam hubungannya terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian terdahulu cenderung lebih banyak membahas tenaga kerja dan infrastruktur secara umum, sementara kajian mengenai pengaruh industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan masih relatif jarang dilakukan.

Oleh karena itu, industri pengolahan non-migas dipilih dalam penelitian ini karena sektor tersebut mencakup berbagai jenis industri yang bersifat padat karya, memiliki daya serap tenaga kerja yang besar, serta berperan penting dalam penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan masyarakat (Septiadi, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perluasan lapangan

kerja produktif, salah satunya melalui pengembangan industri pengolahan non-migas yang berpotensi menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dan sektor mikro, serta berkontribusi dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan (Septiadi, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, diduga bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dapat dipengaruhi oleh kondisi tenaga kerja mikro, ketersediaan infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis yang berjudul **Pengaruh Tenaga Kerja Mikro, Akses Infrastruktur Listrik, Dan Industri Pengolahan Non-Migas Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2010–2024.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jangka pendek tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010–2024?
2. Bagaimana pengaruh jangka panjang tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka pendek tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010–2024.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh jangka panjang tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2010–2024.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan terapan ilmu pengetahuan.

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penggunaan variabel industri pengolahan non-migas serta penerapan metode *Vector Error Correction Model* (VECM) yang masih relatif terbatas digunakan dalam analisis kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman teoritis mengenai peran tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan industri pengolahan non-migas terhadap tingkat

kemiskinan, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi pembangunan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memberikan informasi mengenai pentingnya penguatan tenaga kerja mikro, peningkatan akses infrastruktur listrik, serta pengembangan industri pengolahan non-migas dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat menyusun kebijakan yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, khususnya terkait peran tenaga kerja mikro, akses infrastruktur listrik, dan perkembangan industri pengolahan non-migas. Dengan memahami hal tersebut, masyarakat khususnya tenaga kerja mikro diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memanfaatkan akses listrik secara optimal, serta memanfaatkan peluang kerja pada sektor industri guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan bahan pembanding bagi penelitian selanjutnya dalam bidang ekonomi

pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kemiskinan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan industrialisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar untuk pengembangan penelitian lebih lanjut dengan penambahan variabel maupun perluasan cakupan wilayah penelitian.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Indonesia.

1.5.2 Waktu Penelitian

Tabel 1. 1 Matriks Jadwal Penelitian

[illegible]

